

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kelurahan Sarang Halang**

##### **1. Letak Geografis Lokasi Penelitian**

Kelurahan Sarang Halang merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Pelaihari sendiri terdiri dari 5 kelurahan dan 15 desa, dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 364,03 km<sup>2</sup>. Secara geografis, wilayah Kecamatan Pelaihari terletak pada koordinat 114,642°–114,872° Bujur Timur dan 3,640620°–3,992040° Lintang Selatan. Kelurahan Sarang Halang memiliki luas wilayah sekitar 8,07 km<sup>2</sup>, yang setara dengan 2,22 persen dari total luas Kecamatan Pelaihari. Kelurahan Sarang Halang memiliki letak yang strategis karena dekat dengan pusat Kecamatan Pelaihari dan ibukota Kabupaten Tanah Laut, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai fasilitas pelayanan publik.<sup>1</sup>

##### **2. Data Kependudukan Kelurahan Sarang Halang**

Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk di Kelurahan Sarang Halang tercatat sebanyak 7.595 jiwa, yang terdiri dari 3.756 jiwa laki-laki dan 3.839 jiwa perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Kelurahan Sarang Halang merupakan salah satu wilayah di

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Pelaihari Dalam Angka 2025*, Vol. 38. 3-5.

Kecamatan Pelaihari yang memiliki tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi. Jumlah penduduk yang relatif besar menjadikan kelurahan ini sebagai salah satu wilayah dengan konsentrasi penduduk yang menonjol dibandingkan kelurahan lainnya di Kecamatan Pelaihari.<sup>2</sup>

### 3. Kondisi Masyarakat Kelurahan Sarang Halang

Data kondisi masyarakat sangat penting untuk perencanaan pemerintah dalam segala bidang, terutama digunakan pemerintah dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Kelurahan Sarang Halang terdiri dari berbagai lapisan sosial ekonomi, mulai dari kelompok berpenghasilan rendah, menengah, hingga sejahtera.

#### a. Tingkat kebutuhan dasar

##### 1) Pengeluaran Konsumsi

Tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga masyarakat dapat dilihat berdasarkan pengeluaran untuk biaya pangan dan non pangan dengan merata-ratakan minimal pengeluaran perbulannya, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4. 1**  
**Pola Konsumsi Masyarakat Kelurahan Sarang Halang**

No	Pola Konsumsi	Jumlah Pengeluaran (Perbulan)
1	Kebutuhan Pangan/Papan	Rp. 750.000,-
2	Kebutuhan Sandang/Pakaian	Rp. 300.000,-
3	Biaya Pendidikan	Rp. 500.000,-
4	Biaya Kesehatan	Rp. 250.000,-
5	Biaya lain-lain (Listrik, Kuota, dll)	Rp. 200.000,-

Sumber: Hasil Wawancara Staff Kantor kelurahan sarang Halang

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, Kecamatan Pelaihari Dalam Angka 2025, vol. 38. 51.

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pengeluaran rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Sarang Halang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan, diikuti oleh biaya pendidikan. Pola ini menunjukkan keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan di luar kebutuhan dasar, sehingga menegaskan kondisi kerentanan ekonomi dan relevansi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya pemerintah dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarga kurang mampu.

## 2) Tingkat Kesehatan

Kesehatan masyarakat di wilayah ini didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai serta mudah dijangkau. Fasilitas kesehatan seperti puskesmas sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama tersedia di wilayah kelurahan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan, imunisasi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pengobatan dasar. Selain itu, rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan rujukan juga berada di kawasan yang relatif dekat dengan permukiman warga.

Kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan tersebut didukung oleh kondisi infrastruktur jalan dan sarana transportasi yang cukup baik, sehingga jarak dan waktu tempuh menuju layanan

kesehatan relatif singkat. Dengan aksesibilitas yang baik ini, masyarakat lebih ter dorong untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan dan keterjangkauan sarana kesehatan berkontribusi positif terhadap peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

b. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan masyarakat Kelurahan Sarang Halang yang ditinjau berdasarkan mata pencaharian dapat diketahui melalui tabel di bawah ini.

**Tabel 4. 2**  
**Pendapatan Rata-Rata Masyarakat Kelurahan Sarang halang**

No	Mata Pencaharian	Jumlah Orang	Jumlah Penghasilan (Rp)
1	Pedagang	550	1.000.000 – 2.500.000
2	Petani/Perkebun	150	1.000.000 – 1.500.000
3	Buruh Lepas	415	1.000.000 – 1.00.000
4	Karyawan Swasta	250	3.000.000 – 5.000.000
5	TNI/POLRI	245	2.500.000 – 5.000.000
6	PNS	320	1.500.000 – 4.5000.000

Sumber: Data diolah dari dokumentasi/profil Kelurahan Sarang Halang

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa tingkat pendapatan masyarakat Kelurahan Sarang Halang menunjukkan variasi yang cukup beragam, mulai dari pendapatan terendah hingga tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memiliki penghasilan di atas batas minimum kesejahteraan, sementara sebagian lainnya masih berada di bawah batas minimum nilai kesejahteraan. Adapun

masyarakat yang berpenghasilan rendah dibawah sejahtera pada Kelurahan Sarang Halang sebagai berikut:

**Tabel 4. 3**  
**Masyarakat dibawah garis kemiskinan**

No	Mata Pencaharian	Jumlah Orang	Jumlah Penghasilan (Rp)
1	Petani/pekebun	103	100.000 – 500.000
2	Buruh lepas	115	100.000 – 500.000

Sumber: Data diolah dari data Kantor kelurahan sarang Halang

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan masih banyak di Kelurahan Sarang Halang.

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Kelurahan Sarang Halang dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pendidikan. Berikut ini adalah prasarana pendidikan yang ada di Kelurahan Sarang Halang:

**Tabel 4. 4**  
**Sarana Pendidikan di Kelurahan Sarang Halang**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK/PAUD	3
2	SD/MI	3
3	SMP/Sederajat	1
4	SMA/Sederajat	2

Sumber: Data Kelurahan Sarang Halang

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa prasarana penunjang pendidikan di Kelurahan Sarang Halang tergolong cukup memadai untuk mendukung pendidikan masyarakat hingga jenjang SMA.

Secara umum diketahui Kelurahan Sarang Halang memiliki sistem pendidikan formal yang cukup menunjang kebutuhan masyarakat, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Sementara itu, untuk pendidikan tingkat menengah pertama dan menengah atas, masyarakat umumnya mengakses fasilitas pendidikan yang tersedia di wilayah Kecamatan Pelaihari. Letak kelurahan yang dekat dengan pusat kecamatan memudahkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa harus berpindah ke daerah lain.

Sekolah-sekolah negeri yang berada di Kecamatan Pelaihari menjadi pilihan utama bagi lulusan SMP dari Kelurahan Sarang Halang, baik yang berorientasi akademik maupun kejuruan. Keberadaan sekolah tersebut memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memilih jalur pendidikan sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Dengan demikian, kebutuhan pendidikan lanjutan masyarakat dapat terpenuhi melalui fasilitas pendidikan yang tersedia di lingkungan sekitar kelurahan.

Selain itu, perkembangan pendidikan anak usia dini di Kelurahan Sarang Halang menunjukkan respons positif dari masyarakat. Lembaga PAUD dan taman kanak-kanak yang tersedia berperan penting dalam mempersiapkan anak sebelum memasuki pendidikan dasar. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam peningkatan kualitas pendidikan, khususnya terkait keterbatasan sarana pendukung dan ketersediaan tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi.

Dari sisi latar belakang pendidikan masyarakat, terdapat penduduk Kelurahan Sarang Halang yang telah menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Akan tetapi, sebagian dari mereka tidak menetap di wilayah kelurahan karena keterbatasan kesempatan kerja yang sesuai. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja di tingkat lokal.

Secara sosial ekonomi, masyarakat Kelurahan Sarang Halang memiliki mata pencaharian yang beragam, dengan dominasi pada sektor informal dan jasa. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi turut mempengaruhi dinamika sosial ekonomi, termasuk meningkatnya kebutuhan akan layanan pendidikan dan program kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, Program Keluarga Harapan berperan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam membantu keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan dan layanan dasar lainnya.<sup>3</sup>

Untuk mengetahui bentuk bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sarang Halang, perlu dilihat komponen bantuan yang melekat pada masing-masing keluarga. Komponen PKH ditetapkan berdasarkan kondisi dan kebutuhan anggota keluarga, seperti pendidikan, kesehatan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Adapun

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, Kecamatan Pelaihari Dalam Angka 2025, vol. 38. 63-66

komponen Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Sarang Halang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 5**  
**Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Komponen**

Komponen PKH	Besaran Bantuan per Tahap	Besaran Bantuan per Tahun
Ibu hamil/nifas	Rp 750.000	Rp 3.000.000
Anak usia dini/balita	Rp 750.000	Rp 3.000.000
Lanjut usia (lansia)	Rp 600.000	Rp 2.400.000
Penyandang disabilitas	Rp 600.000	Rp 2.400.000
Anak sekolah SD/sederajat	Rp 225.000	Rp 900.000
Anak sekolah SMP/sederajat	Rp 375.000	Rp 1.500.000
Anak sekolah SMA/sederajat	Rp 500.000	Rp 2.000.000

Sumber: Kemensos

Berdasarkan tabel diatas, besaran bantuan PKH dirancang dengan pendekatan berbasis kebutuhan (*need-based*).

#### **4. Sejarah dan Perkembangan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tanah Laut**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami perkembangan yang cukup signifikan, baik dari sisi mekanisme pendataan, cakupan wilayah, maupun komponen penerima bantuan. Pada tahap awal pelaksanaan, yaitu tahun 2008, pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih bersumber dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang pada saat itu dikenal dengan istilah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Data tersebut digunakan sebagai dasar

penetapan sasaran awal penerima PKH dan dikelola secara terpusat oleh pemerintah.<sup>4</sup>

Pada tahun 2008, pelaksanaan awal PKH di Kalimantan Selatan dilaksanakan secara terbatas di beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Barito Kuala. Khusus di Kabupaten Tanah Laut, pelaksanaan PKH pada tahap awal hanya mencakup Kecamatan Pelaihari, Takisung, Kurau, dan Panyipatan. Penetapan wilayah tersebut didasarkan pada kondisi kemiskinan dan kesiapan daerah dalam mendukung pelaksanaan program.

Seiring dengan perkembangan wilayah administratif, pada tahun 2010 terjadi perluasan pelaksanaan PKH di Kabupaten Tanah Laut dengan ditambahkannya Kecamatan Bajuin dan Kecamatan Bumi Makmur. Perluasan ini menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 2014, di mana pelaksanaan PKH di Kabupaten Tanah Laut diperluas hingga mencakup seluruh kecamatan, yaitu Batu Ampar, Bajuin, Bumi Makmur, Jorong, Kintap, Kurau, Panyipatan, Pelaihari, Takisung, Tambang Ulang, dan Tinggiran Baru. Perluasan cakupan wilayah ini bertujuan untuk memastikan pemerataan akses bantuan sosial bagi keluarga miskin dan rentan miskin di seluruh wilayah kabupaten.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Pedoman Umum Program Keluarga Harapan," Jakarta, 2016. 12-13.

<sup>5</sup> Sari Emilia, Penata Layanan Operasional, *Wawancara Pribadi*, Angsau, 10 Desember 2025.

Pada masa awal pelaksanaannya, komponen bantuan PKH masih terbatas, yaitu hanya diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu menyusui atau nifas, anak usia 0–5 tahun, anak usia taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), serta penyandang disabilitas. Pembatasan komponen tersebut mencerminkan fokus awal PKH pada pemenuhan kebutuhan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan.

Selanjutnya, pada tahun 2016, dilakukan penyesuaian komponen penerima bantuan PKH berdasarkan usulan pendamping PKH di lapangan, sehingga bantuan tidak hanya diberikan kepada anak usia sekolah dasar dan menengah pertama, tetapi juga diperluas hingga mencakup anak sekolah menengah atas (SMA/sederajat) serta lanjut usia (lansia). Penambahan komponen ini dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan sosial keluarga miskin secara berkelanjutan.

Perubahan juga terjadi dalam mekanisme pendataan penerima PKH. Jika pada tahap awal data penerima bersumber dari survei BPS, maka sejak tahun 2019 pendataan dilakukan melalui mekanisme usulan dari desa atau kelurahan, yang diawali dari tingkat Rukun Tetangga (RT). Usulan tersebut diproses secara berjenjang oleh operator desa (operasional desa), kemudian dikelola oleh Dinas Sosial, dan selanjutnya diteruskan ke Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) sebagai pengendali data nasional. Apabila Dinas Sosial memerlukan penambahan KPM, maka data terlebih

---

dahulu dilakukan pengecekan dan penyesuaian melalui sistem Pusdatin PKH guna menjamin ketepatan sasaran dan validitas data penerima bantuan.<sup>6</sup>

## B. Penyajian Data

Berikut ini peneliti sajikan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Sarang Halang pada Tahun 2025:

**Tabel 4. 6**  
**Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kelurahan Sarang Halang Tahun 2025**

No	Alamat (RT)	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
1	001	7	8	7	6
2	002	6	7	6	5
3	003	7	8	7	6
4	004	8	9	8	7
5	005	7	10	9	9
6	006	6	7	8	6
7	007	8	9	7	6
8	008	7	8	7	6
9	009	7	8	7	6
10	010	2	4	4	2
11	011	2	3	3	2
12	012	2	4	4	2
13	013	2	3	3	2
14	014	2	4	4	2
15	015	2	4	4	2
16	016	2	4	3	1
	Jumlah	77	96	88	70

Sumber: Data di peroleh dari Pendamping PKH Kelurahan Sarang Halang

Jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sarang Halang tahun 2025 berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa

---

<sup>6</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Petunjuk Teknis Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial RI,” Jakarta, 2019. 8-11

penyaluran bantuan dilakukan dalam empat tahap dan telah menjangkau seluruh RT yang tercantum, dengan jumlah penerima yang bervariasi pada setiap tahap penyaluran.

Distribusi penerima bantuan antar RT menunjukkan adanya perbedaan jumlah penerima. RT 001 hingga RT 009 merupakan wilayah dengan jumlah penerima relatif lebih banyak dibandingkan RT 010 sampai RT 016, yang memiliki jumlah penerima lebih sedikit pada setiap tahap penyaluran. Perbedaan tersebut mencerminkan variasi kondisi sosial ekonomi, jumlah kepala keluarga, serta tingkat kebutuhan masyarakat di masing-masing RT.

Dari data penerima PKH di Kelurahan Sarang Halang yang terdapat pada tabel diatas ada beberapa informan yang peneliti jadikan sample untuk diobservasi dan diwawancara. Berikut dibawah ini hasil wawancara dengan informan:

### **1. Identitas Responden dan Hasil Wawancara**

#### a. Informan Pertama, Dinas Sosial

Nama : Budiman Hariyanto

Umur : 50 tahun

Pekerjaan/jabatan : Penanggungjawab Jaminan Sosial

PPKS-PSKS

Alamat :

Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budiman selaku pihak Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut menjelaskan bahwa PKH merupakan program bantuan sosial dari Kementerian Sosial yang

dilaksanakan melalui sistem pendampingan di setiap wilayah. Di Kabupaten Tanah Laut, pelaksanaan PKH didukung oleh 33 koordinator kabupaten.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa PKH merupakan bantuan sosial bersyarat, sehingga penerima bantuan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan diawasi secara ketat oleh pendamping PKH. Sosialisasi kepada masyarakat dilaksanakan oleh pendamping PKH, sementara Dinas Sosial berperan dalam koordinasi dan pengawasan melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh koordinator kabupaten. Rapat tersebut menjadi forum penyampaian laporan, keluhan, dan permasalahan di lapangan, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>7</sup>

b. Informan Kedua, Kantor Kelurahan

Nama	:	Yudi Susanto
Umur	:	40 tahun
Pekerjaan/jabatan	:	Kasi Kemasyarakatan
Alamat	:	Komp. Griya Hamparan Blok. C No. 54 Desa Atu-atu
Uraian hasil wawancara	:	

---

<sup>7</sup> Budiman Hariyanto, Penanggungjawab Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, *Wawancara Pribadi*, Pelaihari, 12 November 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yudi Susanto selaku Kepala Seksi Kemasyarakatan di Kelurahan Sarang Halang, menjelaskan bahwa peran kelurahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bersifat administratif dan pendukung. Data penerima PKH pada dasarnya berasal dari Dinas Sosial, sementara pihak kelurahan membantu proses pendaftaran karena sistem aplikasi PKH diakses melalui kelurahan. Namun demikian, kelurahan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan hanya dapat membantu mengusulkan warga yang dinilai kurang mampu.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa proses pendataan dan verifikasi KPM dilakukan oleh pendamping PKH yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial dan bertugas melakukan survei langsung ke lapangan. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan adanya perbedaan pemahaman masyarakat terkait kriteria penerima Program Keluarga Harapan, sehingga diperlukan proses verifikasi dan pemutakhiran data yang dilakukan secara berkelanjutan agar bantuan yang diberikan tetap tepat sasaran.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Yudi Susanto, Kasi Kemasyarakatan Kelurahan Sarang Halang, *Wawancara Pribadi*, Sarang Halang, 12 November 2025.

c. Informan Ketiga, Kantor Kelurahan

Nama	:	Siti Patimah
Umur	:	34 tahun
Pekerjaan/jabatan	:	ASN Kelurahan
Alamat	:	Jl. A. Yani RT. 05 Sarang Halang
Uraian hasil wawancara	:	

Berdasarkan hasil wawancara dengan Siti Patimah selaku ASN di Kelurahan Sarang Halang menjelaskan bahwa pihak kelurahan berperan sebagai penghubung antara masyarakat, pendamping PKH, dan Dinas Sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Apabila terdapat warga yang mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan, pihak kelurahan akan membantu dalam proses administrasi dan meneruskan data tersebut kepada pendamping PKH untuk dilakukan verifikasi kelayakan.

Selain itu, dijelaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan PKH dilakukan secara langsung melalui transfer bank kepada Keluarga Penerima Manfaat dan tidak melalui pihak kelurahan. Program PKH dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima manfaat, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan di bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga pelaksanaannya di Kelurahan Sarang Halang dirasakan cukup bermanfaat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Siti Patimah, ASN Kelurahan, *Wawancara Pribadi*, Sarang Halang, 12 November 2025.

d. Informan Keempat, Pendamping PKH

Nama : Mahrita  
Umur : 34 tahun  
Pekerjaan/jabatan : Penata Layanan Operasional  
Alamat : Jl. Pintu Air RT. 24 RW. 007  
Angsau Pelaihari

Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mahrita selaku pendamping PKH di Kelurahan Sarang Halang menjelaskan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan. Pendampingan dilakukan secara rutin melalui pemutakhiran data serta pertemuan kelompok yang disebut Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dilaksanakan setiap bulan. Pertemuan tersebut dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi mekanisme PKH, penyampaian hak dan kewajiban KPM, serta dilakukan absensi kehadiran sebagai bentuk pemantauan kepatuhan penerima bantuan.

Pendamping PKH juga bertugas memastikan bantuan diterima tepat sasaran melalui pemantauan langsung ke sekolah dan fasilitas kesehatan untuk memastikan pemenuhan kewajiban pendidikan dan kesehatan KPM. Bantuan PKH disalurkan setiap tiga bulan sekali dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan komponen keluarga.

Meskipun demikian, masih ditemukan kendala berupa tidak tersalurkannya bantuan akibat kenaikan desil kesejahteraan serta ketidaksinkronan data pendidikan dalam sistem Dapodik. Kendala tersebut ditangani melalui koordinasi antara pendamping, pihak kelurahan, dan Dinas Sosial. Secara keseluruhan, pelaksanaan dan mekanisme PKH di Kelurahan Sarang Halang dinilai telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>10</sup>

e. Informan Kelima, Pendamping PKH

Nama : Sari Emilia

Umur : 48 tahun

Pekerjaan/jabatan : Penata Layanan Operasional

Alamat :

Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sari selaku pendamping PKH, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sarang Halang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mengalami pembaruan kebijakan dari tahun ke tahun. Program PKH di Kabupaten Tanah Laut mulai dilaksanakan sejak tahun 2008 dan secara bertahap diperluas hingga mencakup seluruh kecamatan. Sasaran program juga berkembang, dari awalnya hanya ibu hamil, balita, serta anak SD dan SMP, hingga mencakup anak SMA, lansia, dan

---

<sup>10</sup> Mahrita, Penata Layanan Operasional, *Wawancara Pribadi*, Angsau, 12 November 2025.

penyandang disabilitas dengan besaran bantuan yang disesuaikan berdasarkan masing-masing komponen.

Dalam pelaksanaannya ibu sari menjelaskan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki hak untuk menerima bantuan PKH, namun juga diwajibkan memenuhi ketentuan program, seperti menghadiri pertemuan kelompok setiap bulan, memastikan anak bersekolah, serta mengikuti kegiatan posyandu. Pertemuan kelompok dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian hak dan kewajiban penerima PKH, pengisian absensi, serta sosialisasi informasi terbaru terkait mekanisme dan kebijakan PKH dari Kementerian Sosial. Pendamping juga melakukan pemantauan ke sekolah dan fasilitas kesehatan. Meskipun program berjalan dengan baik, masih terdapat kendala seperti bantuan tidak tersalurkan akibat kenaikan desil kesejahteraan dan permasalahan data pendidikan dalam sistem, namun kendala tersebut ditangani dengan diskusi pendamping.<sup>11</sup>

f. Informan Keenam, Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Nama : Ainun Jariah

Umur : 49 tahun

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Jl. Kampung Kariup RT. 01

---

<sup>11</sup> Sari Emilia, Penata Layanan Operasional, *Wawancara Pribadi*, Angsau, 10 Desember 2025.

Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ainun Jariah, menjelaskan bahwa beliau telah menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2009. Proses penerimaan PKH diawali dari pendataan kependudukan yang dilakukan melalui survei sensus. Bantuan PKH saat ini disalurkan setiap tiga bulan sekali melalui kartu ATM, meskipun pada awal pelaksanaan program bantuan masih diambil melalui kantor pos. Dalam keluarga Ibu Ainun Jariah, terdapat dua anak yang menerima bantuan pendidikan.

Ibu Ainun Jariah menyampaikan bahwa bantuan PKH sangat membantu, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Selama menjadi penerima PKH, beliau tidak mengalami kendala dalam penyaluran bantuan. Pendamping PKH juga secara rutin melaksanakan pertemuan kelompok penerima PKH atau P2K2 yang dilaksanakan setiap bulan, untuk memantau kepatuhan penerima terhadap kewajiban program serta memberikan sosialisasi terkait kesehatan, seperti pencegahan stunting, dan pengelolaan keuangan keluarga agar dana bantuan digunakan sesuai peruntukannya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ainun Jariah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Sarang Halang, 12 November 2025.

g. Informan Ketujuh, KPM

Nama	:	Fatimah
Umur	:	46 tahun
Pekerjaan	:	Pembantu Rumah Tangga
Alamat	:	RT. 005 RW. 02 Sarang Halang
Uraian hasil wawancara	:	

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fatimah, beliau menjelaskan bahwa dirinya terdaftar sebagai penerima PKH sejak tahun 2020 dengan komponen pendidikan untuk dua orang anak. Namun, dalam pelaksanaannya, beliau pernah mengalami kendala berupa keterlambatan pencairan bantuan yang menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak.

Meskipun demikian, beliau tetap menilai bahwa PKH merupakan program yang sangat membantu masyarakat kurang mampu, hanya saja dari sisi teknis penyaluran dan ketepatan waktu pencairan masih perlu adanya perbaikan agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh penerima.<sup>13</sup>

h. Informan Kedelapan, KPM

Nama	:	Ruslan Effendy
Umur	:	57 tahun

---

<sup>13</sup> Fatimah, Pembantu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Sarang Halang, 15 November 2025.

Pekerjaan : Ojek

Alamat : Jl. Kampung Kariup RT. 004

Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ruslan Effendy, beliau menjelaskan bahwa dirinya mulai terdaftar sebagai penerima bantuan PKH sejak tahun 2022. Sebagai penerima bantuan, beliau sempat mengalami kendala berupa tidak diterimanya bantuan PKH selama dua tahap pencairan berturut-turut. Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan karena sebelumnya bantuan selalu diterima secara rutin.

Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, beliau kemudian mengonfirmasi langsung kepada pendamping PKH. Dari hasil konfirmasi tersebut diketahui bahwa tidak diterimanya bantuan disebabkan oleh adanya kesalahan pada data administrasi penerima.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa proses pemutakhiran data penerima PKH masih belum maksimal, sehingga berdampak langsung pada kelancaran penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat.<sup>14</sup>

#### i. Informan Kesembilan, KPM

Nama : Jurniah

Umur : 50 tahun

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

---

<sup>14</sup> Ahmad Ruslan Effendy, Ojek, *Wawancara Pribadi*, Sarang Halang, 22 November 2025.

Alamat : RT. 03 RW. 02 (dekat kantor kelurahan sarang halang)

Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Jurniah, beliau menjelaskan bahwa menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak anaknya berusia 8 tahun atau saat duduk di kelas 2 Sekolah Dasar. Penerimaan bantuan tersebut diawali melalui proses pendataan yang berasal dari kegiatan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Bantuan PKH diterima dalam bentuk uang tunai yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak, terutama keperluan sekolah dan uang jajan.

Ibu Jurniah juga menjelaskan bahwa pendamping PKH secara rutin mengadakan pertemuan kelompok penerima PKH yang dilaksanakan setiap bulan. Pertemuan tersebut menjadi sarana penyampaian informasi serta pemantauan terhadap kewajiban penerima PKH. Selama mengikuti program PKH, beliau menyampaikan bahwa proses pencairan bantuan berjalan tepat waktu dan tidak mengalami kendala yang berarti, sehingga bantuan PKH dinilai memberikan manfaat dalam mendukung kebutuhan pendidikan anak.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Jurniah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Sarang Halang, 18 November 2025.

j. Informan Kesepuluh, KPM

Nama : Zainab  
Umur : 70 tahun  
Pekerjaan : Pedagang kecil  
Alamat : Kampung Kariup RT. 004

Uraian Hasil Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nenek Zainab, seorang lanjut usia penerima Program Keluarga Harapan (PKH), diketahui bahwa bantuan PKH yang seharusnya diterima sejak bulan Maret tidak diterima hingga bulan November. Selama beberapa tahap pencairan tersebut, beliau tidak memperoleh bantuan maupun penjelasan yang jelas terkait penyebab permasalahan tersebut.

Pada bulan Desember, Nenek Zainab menerima bantuan sebesar Rp600.000, namun bantuan yang tidak diterima pada tahap-tahap sebelumnya tidak diterima. Kondisi ini menimbulkan kebingungan dan kepasrahan karena beliau tidak mengetahui mekanisme penyampaian keluhan. Beliau memiliki anak yang menurut beliau tergolong membutuhkan bantuan juga karena masih memiliki dua orang anak yang masing-masing berusia lima tahun dan empat tahun. Nenek Zainab mengaku merasa kasihan, namun tidak berani banyak bertanya atau melapor karena merasa bingung dan khawatir justru akan menimbulkan masalah baru.

Beliau menyampaikan bahwa dirinya rutin mengikuti kegiatan arisan yang biasa diadakan bersama sesama penerima PKH, yang menjadi wadah untuk berkumpul dan saling berbagi cerita, meskipun permasalahan bantuan yang tidak diterima belum mendapatkan solusi yang pasti.<sup>16</sup>

k. Informan Kesebelas, KPM

Nama	:	Tuniah
Umur	:	51 tahun
Pekerjaan/jabatan	:	Pembantu rumah tangga
Alamat	:	Jl. A. Yani RT. 005 RW. 005 Kelurahan Sarang Halang

Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tuniah, beliau menjelaskan bahwa anak-anak beliau mulai menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2017. Dalam satu keluarga, terdapat tiga anak yang pernah menerima bantuan PKH, namun bantuan tersebut diberikan secara bergantian karena ketentuan program hanya menanggung maksimal dua anak dalam satu keluarga. Proses penerimaan PKH diawali melalui kegiatan pendataan dan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan melibatkan pihak Dinas Sosial dan ketua RT setempat. Bantuan PKH diterima

---

<sup>16</sup> Zainab, Pedagang Kecil, *Wawancara Pribadi*, Sarang Halang, 18 November 2025.

dalam bentuk uang tunai yang digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak.

Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa bantuan PKH dimanfaatkan untuk membayar keperluan sekolah anak, seperti buku, pakaian, dan uang jajan. Selama mengikuti program PKH, beliau pernah mengalami kendala berupa penghentian sementara bantuan karena anaknya bersekolah di lembaga pendidikan swasta, yaitu pondok pesantren, sehingga tidak menerima bantuan selama satu tahun. Namun, setelah melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak Dinas Sosial, bantuan PKH kembali diterima. Secara umum, beliau menyatakan bahwa bantuan PKH sangat membantu dan anak-anaknya tetap memenuhi kewajiban untuk bersekolah.<sup>17</sup>

## 2. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matriks

Uraian wawancara secara ringkas peneliti sampaikan dengan menggunakan matriks, mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sehingga memudahkan dalam memahaminya, berikut tabel matriknya:

---

<sup>17</sup> Tuniah, Pembantu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Sarang Halang, 15 November 2025.

**Tabel 4. 5**  
**Matrik**

No	Nama	Uraian Singkat	Dampak	Kendala
1	Budi Hariyanto (Penanggungjawab Jaminan Sosial PPKS-PSKS)	Dinas Sosial, dan Pendamping Berkoordinasi dalam pelaksanaan PKH	Pelaksanaan PKH lebih terarah	Permasalahan lapangan memerlukan koordinasi lanjutan
2	Yudi Susanto (Kasi Kemasyarakatan)	Kelurahan, membantu administrasi dan pengusulan calon KPM	Penyaluran bantuan lebih tertib	Pemahaman masyarakat tentang kriteria PKH masih berbeda
3	Siti Patimah (ASN Kelurahan)	Kelurahan, menjadi penghubung masyarakat dan pendamping	Penyaluran bantuan lebih tertib	Pemahaman masyarakat tentang kriteria PKH masih berbeda
4	Mahrita (Penata Layanan Operasional)	Pendamping, melakukan P2K2 dan pemutakhiran data rutin	Kepatuhan KPM meningkat	Kendala beberapa data tidak singkron dan perubahan desil
5	Sari Emilia (Penata Layanan Operasional)	Pendamping, PKH berkembang dan sasaran penerima bertambah	Jangkauan bantuan semakin luas	Kendala data dan status kesejahteraan
6	Ainun Jariah (Ibu rumah tangga)	Ibu rumah tangga, sehingga sangat memerlukan bantuan PKH	Membantu biaya sekolah anak	Tidak mengalami kendala
7	Fatimah (Pembantu Rumah Tangga)	Bekerja dengan penghasilan harian yang tidak menentu sehingga bantuan PKH diperlukan untuk membantu biaya sekolah anak.	Mendukung keberlangsungan pendidikan anak	keterlambatan pencairan bantuan yang menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak
8	Ruslan Effendy (Ojek)	memiliki pendapatan tidak tetap sehingga bantuan PKH	Meringankan beban pengeluaran keluarga	Tidak merima bantuan PKH selama dua tahap

		sangat membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga		pencairan berturut-turut
9	Jurniah (Ibu rumah tangga)	Ibu rumah tangga, dengan penghasilan tidak pasti sehingga memerlukan bantuan PKH	Mengurangi beban ekonomi keluarga	Tidak ditemukan kendala berarti
10	Zainab (Pedagang kecil, penjual buah rumahan)	Seorang lansia, dengan keterbatasan fisik dan penghasilan, sangat bergantung pada bantuan PKH untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.	Berdampak positif pada pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari	Kendala teknis penyaluran
11	Tuniah (Pembantu rumah tangga)	Pembantu rumah tangga serta orang tua tunggal, sehingga bantuan PKH sangat diperlukan	Membantu kebutuhan pendidikan anak	Bantuan sempat diberhentikan karena status sekolah

### C. Analisis Data

Analisis data pada bab ini dilakukan untuk menjawab dua rumusan masalah utama yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana Efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Salang Halang kecamatan pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di kelurahan Sarang Halang kecamatan pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

Pelaksanaan kebijakan publik dalam bidang kesejahteraan sosial tidak hanya dituntut efektif secara administratif, tetapi juga harus berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan Q.S. al-Ma''idah/5: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ اللَّهُ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِي مَنَّكُمْ شَنَآنُ  
قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا إِعْدُلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلنَّقْوَىٰ وَأَنْفَوْا اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا  
تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah dan saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dalam setiap tindakan, termasuk dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Keadilan dalam konteks program sosial tidak hanya dimaknai sebagai perlakuan yang sama, tetapi juga sebagai upaya menempatkan sesuatu sesuai dengan hak dan kebutuhannya. Selain itu, dalam fiqh siyasah ditegaskan bahwa “*tasharruf al-imām ‘ala ar-ra‘iyah manūtun bi al-maṣlaḥah*”, yang berarti bahwa setiap kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan.<sup>18</sup> Kemaslahatan tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif yang bersifat abstrak, tetapi menjadi asas praktis yang harus dijadikan pijakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan serta melaksanakan setiap kebijakan publik. Oleh karena itu, analisis dalam bab ini diarahkan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan PKH telah mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam praktiknya di tingkat kelurahan.

<sup>18</sup> Agnes E Manalu dkk., Analisis Persepsi Mahasiswa PPKn UNIMED Tentang Asas Kemaslahatan Pada Program Makan Bergizi Gratis Dalam Tinjauan Hukum Islam, 3, no. 5 (2025): 7401.

## **1. Efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Salang Halang kecamatan pelaihari Kabupaten Tanah Laut**

### **a. Pemahaman Program**

Analisis indikator pemahaman program dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksana program dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memahami tujuan, mekanisme, serta hak dan kewajiban dalam Program Keluarga Harapan.<sup>19</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial, aparatur kelurahan, pendamping PKH, dan KPM, dapat diketahui bahwa pemahaman terhadap PKH umumnya disampaikan melalui kegiatan sosialisasi dan pertemuan kelompok (P2K2). Namun demikian, masih ditemukan adanya perbedaan pemahaman masyarakat terkait kriteria penerima dan mekanisme bantuan, yang menunjukkan bahwa pemahaman program belum sepenuhnya merata.

### **b. Ketepatan Sasaran**

Ketepatan sasaran dianalisis untuk menilai kesesuaian antara penerima bantuan PKH dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Dalam konteks pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), prinsip keadilan ini tercermin pada proses pendataan dan penetapan penerima manfaat yang harus dilakukan secara objektif dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar KPM menerima bantuan sesuai dengan

---

<sup>19</sup> Cania Dan Mulyati, "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung". 5.

<sup>20</sup> Muhammad Jarkasih, Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, t.t., 3. 3.

kondisi ekonomi dan komponen keluarga yang dimiliki. Namun, ditemukan pula permasalahan berupa ketidaktepatan sasaran akibat data administrasi yang belum mutakhir, sebagaimana dialami oleh beberapa informan KPM. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum PKH telah menyasar masyarakat kurang mampu, proses pemutakhiran data masih perlu ditingkatkan agar ketepatan sasaran dapat tercapai secara optimal.

c. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu dianalisis untuk menilai kesesuaian pelaksanaan penyaluran bantuan PKH dengan jadwal yang telah ditetapkan.<sup>21</sup> Berdasarkan hasil wawancara, sebagian KPM menerima bantuan secara rutin setiap tahap pencairan. Namun, terdapat pula KPM yang mengalami keterlambatan bahkan tidak menerima bantuan dalam beberapa tahap pencairan. Hal ini menunjukkan bahwa dari aspek ketepatan waktu, pelaksanaan PKH belum sepenuhnya berjalan optimal.

d. Tercapainya Tujuan

Indikator tercapainya tujuan dianalisis dengan melihat sejauh mana pelaksanaan PKH mampu membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas KPM menyatakan bahwa bantuan PKH sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan

---

<sup>21</sup> Cania Dan Mulyati, "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung". 5.

anak dan akses layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa secara substansial tujuan PKH telah tercapai, meskipun masih terdapat kendala teknis dalam pelaksanaannya.

e. Perubahan Nyata

Perubahan nyata dianalisis untuk melihat dampak yang dirasakan oleh KPM setelah menerima bantuan PKH.<sup>22</sup> Berdasarkan hasil wawancara, perubahan yang dirasakan antara lain meningkatnya kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak, meningkatnya kepatuhan terhadap kewajiban pendidikan dan kesehatan, serta adanya peningkatan pengetahuan melalui kegiatan P2K2. Dengan demikian, pelaksanaan PKH telah memberikan dampak positif bagi sebagian besar KPM di Kelurahan Sarang Halang.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut**

Analisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sarang Halang dikaitkan dengan teori efektivitas menurut Sondang P. Siagian, yang memandang efektivitas sebagai kemampuan suatu program pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya serta melaksanakan kegiatan secara terencana untuk mencapai sasaran yang

---

<sup>22</sup> Cania Dan Mulyati, "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung". 5.

telah ditetapkan.<sup>23</sup> Salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan PKH adalah tingkat pemahaman pelaksana dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap tujuan, mekanisme, serta hak dan kewajiban dalam program. Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman program umumnya disampaikan melalui sosialisasi dan pertemuan kelompok (P2K2), namun masih ditemukan perbedaan pemahaman masyarakat terkait kriteria penerima dan mekanisme bantuan, yang berdampak pada munculnya keluhan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program di lapangan.

Faktor lain yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan PKH adalah ketepatan sasaran dan pemutakhiran data penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar KPM telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, namun masih terdapat permasalahan berupa tidak diterimanya bantuan akibat kesalahan data administrasi dan keterlambatan pemutakhiran data. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya dan sistem pendataan belum sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran program, sehingga memengaruhi tingkat efektivitas PKH sebagaimana dimaksud dalam teori efektivitas menurut Sondang P. Siagian.

Selain itu, ketepatan waktu penyaluran bantuan juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan PKH. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat KPM yang menerima bantuan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, namun terdapat pula KPM yang mengalami keterlambatan

---

<sup>23</sup> Rahma Wati Ilihelu dkk., Pengaruh Fasilitas Kantor Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah, 3, no. 1 (2024): 139. 139.

bahkan tidak menerima bantuan dalam beberapa tahap pencairan. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada kemampuan KPM dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan secara tepat waktu, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Faktor koordinasi antarinstansi dan peran pendamping PKH juga turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Pendamping PKH memiliki peran strategis dalam melakukan pendampingan, pemutakhiran data, serta pemantauan pemenuhan kewajiban KPM. Namun, masih ditemui kendala teknis berupa ketidaksinkronan data dan permasalahan sistem administrasi yang memerlukan koordinasi lebih intensif antara pendamping, pihak kelurahan, dan Dinas Sosial. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia sebagai pelaksana program sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan PKH.

Lebih lanjut, perubahan nyata yang dirasakan oleh KPM menjadi faktor penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan PKH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar KPM merasakan manfaat PKH, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak. Namun demikian, masih terdapat KPM yang belum merasakan manfaat secara menyeluruh akibat kendala teknis penyaluran bantuan. Dengan demikian, meskipun PKH telah memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima manfaat, pelaksanaan program masih memerlukan perbaikan agar efektivitasnya dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis teori efektivitas menurut Sondang P. Siagian dan tolok ukur penilaian,<sup>24</sup> pemerintah telah melaksanakan PKH sebagai upaya kebijakan sosial untuk mencapai sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Meskipun pada umumnya pelaksanaan PKH telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masih terdapat beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya yang menunjukkan perlunya pembenahan terkait dengan hambatan yang ada dalam pelaksanaannya.

---

<sup>24</sup> Ilihelu dkk., Pengaruh Fasilitas Kantor Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah.139.